

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah:

Permasalahan	RSUD Kabupaten Lombok Tengah	RSUD Kabupaten Lombok Timur
1. Regulasi Tentang Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Kelas Rawat Inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur	1. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur rumah sakit mengatakan regulasi standar fasilitas sudah ada dan dikelaurkan berdarakan pada SK bupati, namun kenyataan dalam lapangan, peneliti tidak memperoleh SK direktur tentang regulasi standar fasilitas pada keas rawat inap, padahal bila melihat fungsi dari	1. Dari hasil wawancara dengan direktur rumah sakit tentang regulasi standar fasilitas sudah di kelaurkan dalam SK direktur, namun berdsarkan kajian peneliti tidak menemukan surat kepututusan tersebut. Akan tetapi rumah sakit dapat berpedoman terhadap SK yang peneliti

	<p>keputusan tersebut merupakan suatu yang dapat mengikat pelaksanaan dari standar fasilitas tersebut. mengingat tanpa fasilitas rawat inap rumah sakit tidak akan berfungsi. Namun rumah sakit dalam menyelenggarakan fasilitas kelas rawat inap dapat berpedoman SK direktur sesuai dengan yang peneliti peroleh di lapangan yaitu Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 65/KTPTS/DIR/RSUD-P/11/2016 tentang Hak Pasien dan Keluarga (HPK). Karena didalam SK tersebut juga mengatur hal-hal yang merupakan hak pasien dalam memperoleh keselamatan, keamanan,</p>	<p>peroleh di lapangan terkait, SK direktur RSUD Dr. Soejono, Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor. 445/07/PD.RSUD/2016 tentang HPK. Karena standar fasilitas yang disebutkan berdasarkan pada Permenkes no. 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit, juga menyangkut hak pasien seperti yang disebutkan dalam isi dokumen HPK seperti yang disebutkan pada ayat 2, 5, 9, dan 14.</p> <p>Selain regulasi internal rumah sakit, standar fasilitas kelas rawat inap juga</p>
--	--	--

	<p>juga standar pelayanan, dalam Pasal 1, 6, 10, 12.</p> <p>Selain regulasi internal rumah sakit, standar fasilitas kelas rawat inap juga menyesuaikan terhadap peraturan pemerintah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3). ✓ PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Pasal 3 ayat (3). ✓ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda Pasal 13 ayat (1) huruf d dan e. ✓ Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 32 huruf b, i, n dan o 	<p>menyesuaikan terhadap peraturan pemerintah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3). ✓ PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Pasal 3 ayat (3). ✓ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda Pasal 13 ayat (1) huruf d dan e. ✓ Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 32 huruf b, i, n dan o ✓ Peremenkes No. 24 Tahun 2016, tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasaran Rumah Sakit, Pasal 34
--	---	--

	<p>✓ Permenkes No. 24 Tahun 2016, tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). dan Pasal 38 ayat (1) huruf a.</p> <p>2. Berdasarkan hasil kajian dengan direktur yaitu standar pelayanan kesehatan telah diatur didalam <i>hospital by law</i>. Jawaban dari narasumber sesuai dengan yang peneliti temukan didalam <i>hospital by law</i> RSUD Kabupaten Lombok Tengah, tentang penerapan standar pelayanan kesehatan yang sudah disusun oleh komite medis dan komite keperawatan, yang disebutkan dalam Pasal 36</p>	<p>ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). dan Pasal 38 ayat (1) huruf a</p> <p>2. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber menyatakan “standar pelayanan kesehatan sudah di atur dalam <i>hospital by law</i> dan untuk pelaksanaan sesuai SOP, karena pelayanan kesehatan harus diselenggarakan berdasarkan pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat keadilan, persamaan hak, dan anti diskriminasi, perlindungan juga keselamatan, dan pemerataan. Pelayanan yang diselenggarakan sudah disesuaikan</p>
--	--	--

	<p>huruf b “menyusun prosedur pelaksana tetap pelayanan medis”, Pasal 38 huruf a “Merumuskan standar pelayanan profesi” dan Pasal 44 “Memperoleh standar pelayanan kesehatan”. Regulasi yang sudah dikeluarkan tujuannya adalah memberikan kepastian, pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan akibat memungkinkan akibat resiko yang ditimbulkan.</p> <p>Regulasi berdasarkan peraturan yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Rumah Sakit.</p>	<p>sesuai dengan isi kandungan dalam <i>hospital by law</i> menyebutkan dalam Pasal 31 huruf a, Pasal 37 ayat (3), Pasal 53 ayat (5). Regulasi yang sudah dikeluarkan tujuannya adalah memberikan kepastian, pasien sebagai penerima jasa dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit.</p> <p>Regulasi berdasarkan peraturan yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Rumah Sakit.</p>
2. Implementasi Regulasi Tentang	1. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien	1. Mengungkap hasil wawancara yang

<p>Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Kelas Rawat Inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur</p>	<p>masih terdapat banyak fasilitas yang tidak memenuhi standar yang berupa standar kamar mandi yang tidak mengikuti Permenkes, tidak disediakan <i>nurse call</i>, standar keamanan berupa APAR, <i>central oksigen</i>, juga standar keselamatan pintu darurat. Hal tersebut seharusnya di sesuaikan dengan Permenkes No. 24 tahun 2016, seperti jika melihat fungsi dari alat komunikasi dan standar keamanan adalah demi menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit, selain itu untuk menghindari resiko tuntutan akibat pelanggaran seperti yang di sebutkan dalam Pasal 32 huruf i, dan o Undang-Undang Rumah Sakit.</p>	<p>dilakukan terhadap pasien terkait implementasi regulasi standar fasilitas yang diterapkan pada kelas rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok Timur. Adapun hasil jawaban yaitu fasilitas kelas rawat inap belum sesuai dengan standar fasilitas seperti tidak tersedianya <i>nurse call</i>, jika melihat fungsinya adalah sebagai alat komunikasi antara pasien dengan petugas kesehatan, sehingga bila tidak disediakan akan mengurangi fungsi sistem pelayanan kesehatan. Terutama saat terjadi kegawatan dikelas rawat inap, maka perlu dilengkapi fasilitas untuk menghindari</p>
--	---	---

	<p>2. Berdasarkan hasil kajian terhadap pasien mengenai pelaksanaan standar pelayanan kesehatan, dari jawaban pasien menyebutkan masih mendapatkan pengabian pelayanan saat malam hari, dan selain itu pasien tidak memperoleh pelayanan rohani. Mengingat pelayanan kesehatan merupakan fungsi dari rumah sakit, sehingga bila pelayanan kesehatan tidak dijalankan sesuai standar maka dapat mengabaikan hak pasien atas pelayanan kesehatan. Hal itu sesuai prinsip dalam pelayanan kesehatan, dimana pelayanan perawatn dan pelayanan rohani belum dilaksanakan sesuai standar pelayanan</p>	<p>resiko pelanggaran Pasal 32 huruf o Undang-Undang Rumah Sakit juga pelanggaran dalam SK tentang HPK.</p> <p>Adapun permasalahan lain seperti masih tidak sesuai penataan tempat tidur pasien sesuai kelas sehingga akan menimbulkan gangguan rasa nyaman terhadap pasien.</p> <p>2. Dari hasil kajian pelaksanaan standar pelayanan kesehatan, masih tidak sesuai dengan regulasi standar pelayanan kesehatan seperti diungkapkan oleh pasien yaitu pasien mendapat pengabaian</p>
--	--	---

	<p>kesehatan. Sehingga dapat menimbulkan pelanggaran atas Pasal 29 ayat (1) huruf a, b, dan Undang-Undang Keperawatan. Selain itu tanggungan akibat kelalaian.</p>	<p>atas pelayanan perawatan juga pelayanan rohani, jika dilihat dari fungsi kedua pelayanan tersebut adalah bagian dalam pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi sesuai dengan hak pasien. Sehingga dibutuhkan pengawasan dari komite keperawatan untuk menjalankan fungsi pelayanan perawatan sesuai sumpah profesi dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d Undang-Undang Keperawatan. Permasalahan pelayanan rohani karena baru mulai dijalankan sehingga dalam proses melengkapi.</p>
3. Perlindungan Hak Pasien Dalam	1. Berdasarkan hasil kajian peneliti di rumah sakit	1. Dari hasil wawancara dengan direktur

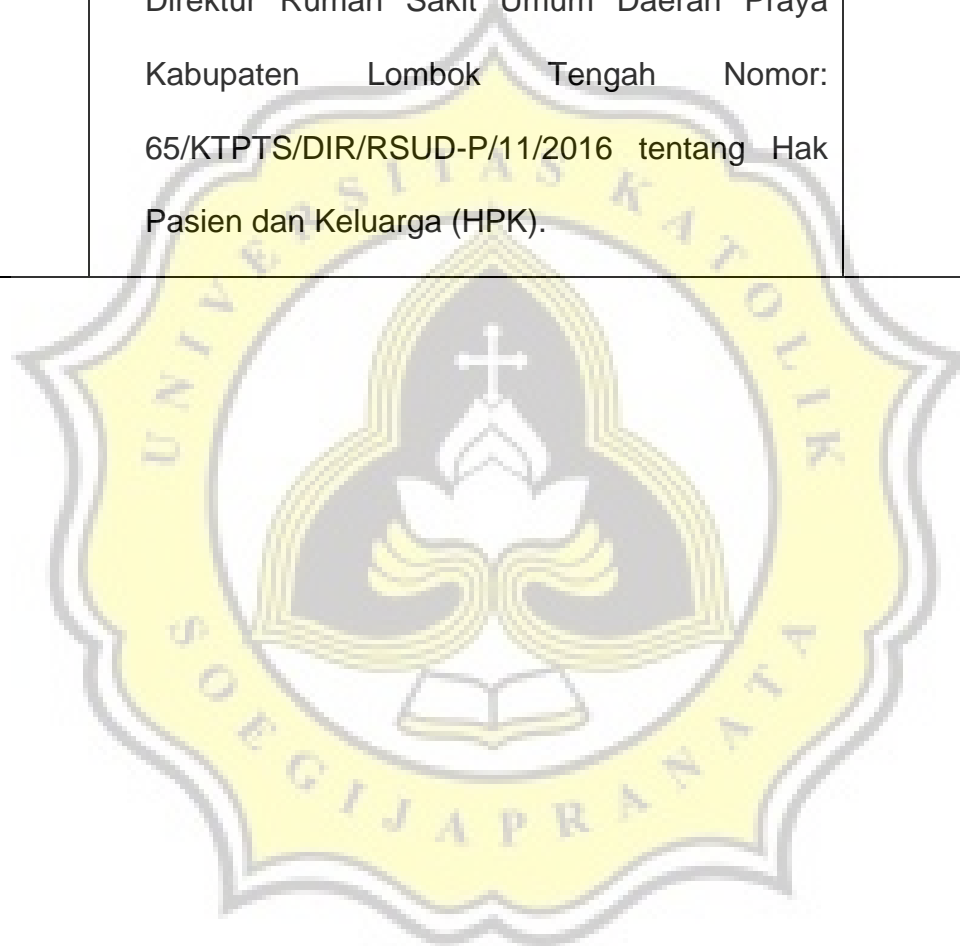
<p>Mendapatkan Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Kelas Rawat Inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur.</p>	<p>tidak menemukan SK direktur tentang regulasi standar fasilitas, sehingga rumah sakit hanya berpedoman terhadap Permenkes No. 24 Tahun 2016, dan hasil kajian peneliti tentang SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 65/KTPTS/DIR/RSUD-P/11/2016 tentang Hak Pasien dan Keluarga (HPK). Sehingga bila mengaitkan antar bunyi pasal didalam SK direktur tentang HPK dapat menjadi perlindungan hak. Namun regulasi standar fasilitas tetap dibutuhkan sebagai pelaksana dalam menjalankan standar fasilitas,</p> <p>2. Regulasi standar pelayanan kesehatan sudah</p>	<p>rumah sakit, peneliti tidak menemukan surat keputusan direktur tentang regulasi standar fasilitas yang seharusnya ada sesuai dengan jawaban hasil wawancara, namun peneliti hanya menemukan SK Direktur RSUD Dr. Soejono, Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor. 445/07/PD.RSUD/2016 tentang Hak Pasien dan Keluarga (HPK), sehingga peneliti mengaitkan antara kandungan SK tentang HPK dengan resiko terhadap penyelenggaraan fasilitas pada kelas rawat inap, sehingga dapat menjadi perlindungan hak. Namun regulasi standar</p>
---	---	---

	<p>diatur didalam <i>hospital by law</i>, dan dapat dijadikan sebagai perlindungan hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai standar.</p> <p>3. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien terkait pelaksanaan standar fasilitas kelas rawat inap masih banyak yang tidak sesuai standar, sehingga belum mampu memberikan perlindungan hak terhadap pasien dalam memperoleh standar fasilitas kelas rawat inap.</p> <p>Sehingga karena rumah sakit belum mampu menyediakan fasilitas sesuai standar, maka rumah sakit harus bersedia menanggung apabila timbul kerugian akibat tidak</p>	<p>fasilitas tetap dibutuhkan sebagai pelaksana dalam menjalankan standar fasilitas sehingga perlu dibentuk.</p> <p>2. Regulasi standar pelayanan kesehatan sudah diatur didalam <i>hospital by law</i>, dan dapat dijadikan sebagai perlindungan hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai standar.</p> <p>3. Berdasarkan hasil wawancara pasien terkait pelaksanaan standar fasilitas pada kelas rawat inap, masih terdapat kekurangan dalam menyelenggarakan standar fasilitas kelas rawat inap hal itu sesuai jawaban pasien terkait tidak tersedianya sistem</p>
--	---	---

	<p>terpenuhinya hak pasien dalam memperoleh standar fasilitas sesuai Pasal 46 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hal karena rumah sakit juga tidak mengindahkan bunyi pasal 32 huruf n Undang-Undang Rumah Sakit.</p> <p>Selain itu Pemda mempunyai tugas dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas yang sesuai standar berdasarkan Pasal 37 ayat (1), dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24. Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.</p> <p>4. Berdasarkan kajian wawancara pasien terkait</p>	<p>komunikasi <i>nurse call</i> dan penataan tempat tidur pasien yang tidak sesuai dengan kelas perawatan.</p> <p>Sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hak pasien berdasarkan SK direktur tentang HPK dalam Pasal 5 dan 14.</p> <p>4. Standar pelayanan kesehatan yang diselenggarakan masih belum dapat memenuhi perlindungan hak pasien hal tersebut berdasarkan pada hasil wawancara dengan pasien dengan jawaban sering diabaikan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, selain</p>
--	---	--

	<p>standar pelayanan kesehatan masih belum memenuhi standar pelayanan kesehatan sehingga belum mampu memberikan perlindungan hak pasien dalam memperoleh pstandr pelayanan kesehatan. Dilihat dari pelayanan yang diberikan seharusnya disesuaikan dengan standar berdasarkan regulasi yang ada. Mengingat fungsi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu menyangkut hajat hidup seseorang atau masyarakat. Selain itu karena rumah sakit tidak melakukan tanggung jawab Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang tentang Kesehatan dan tidak menyesuaikan sesuai isi Surat Keputusan</p>	<p>itu jawaban pasien lain yang memberikan keterangan bahwa tidak memperoleh pelayanan rohani. Hal ini menyebabkan tidak terlindunginya hak pasien atas standar pelayanan kesehatan, Jika melihat hak utama pasien adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan (<i>the right to health care</i>),</p>
--	---	---

	<p>Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 65/KTPTS/DIR/RSUD-P/11/2016 tentang Hak Pasien dan Keluarga (HPK).</p>	
--	---	--



B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

a. RSUD Kabupaten Lombok Tengah

Pengelola rumah sakit harus membuat regulasi tentang standar fasilitas kelas rawat inap demi memberikan perlindungan hak pasien dan manajemen rumah sakit juga harus mengalokasikan dana kepada Pemda setempat untuk melengkapi standar fasilitas yang kurang, serta membuat program peningkatan fasilitas tiap tahun sehingga menyesuaikan standar juga mengevaluasi setiap pelaksanaan standar fasilitas tersebut.

Selain itu rumah sakit harus membuat *informed consent* terhadap pasien demi memberikan perlindungan terhadap rumah sakit dari resiko gugatan akibat keterbatasan fasilitas di rumah sakit. Dan ditambah fungsi komite keperawatan juga harus benar-benar dilaksanakan sesuai fungsi tugas yang telah disebutkan dalam *hospital by law*, supaya tidak menimbulkan kurangnya fungsi standar pelayanan kesehatan. Selain itu rumah sakit harus menyediakan papan informasi tentang hak pasien agar pasien mengetahui hak sebagai pasien

b. RSUD Kabupaten Lombok Timur

Pengelola rumah sakit harus membuat regulasi tentang standar fasilitas kelas rawat inap demi memberikan

perlindungan hak pasien. dan rumah sakit juga harus mengalokasikan dana kepada Pemda melalui manajemen rumah sakit untuk melengkapi standar fasilitas yang masih kurang, serta membuat program peningkatan fasilitas tiap tahun sehingga menyesuaikan standar selanjutnya juga mengevaluasi setiap pelaksanaan standar fasilitas.

Rumah sakit melalui kebijakan direktur didukung Pemda harus membuat *informed consent* terhadap ketersediaan fasilitas, demi memberikan perlindungan atas gugatan pasien atas ketersediaan fasilitas yang belum terpenuhi. Selain itu rumah sakit harus menyediakan papan informasi tentang hak pasien agar pasien mengetahui hak sebagai pasien.

2. Masyarakat

Pasien maupun keluarga pasien harus memperhatikan setiap himbauan atau pengumuman yang ada di rumah sakit, sehingga dapat mengetahui apa saja hak yang dapat diperoleh selama di rumah sakit, serta memberikan masukan terkait penyelenggaraan fasilitas juga pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya rawat inap jika dirasa kurang bermutu, sehingga dapat menjadi evaluasi terhadap rumah sakit dalam menyelenggarakan standar fasilitas pelayanan kesehatan khusus kelas rawat inap.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Pemerintah daerah harus mendukung penyelenggaraan regulasi terkait standar fasilitas kelas rawat inap demi mewujudkan perlindungan hak pasien dalam memperoleh standar fasilitas pada kelas rawat inap. Serta memberikan bantuan anggaran dana terhadap rumah sakit demi melengkapi standar fasilitas. Pemda juga harus memberikan masukan terhadap rumah sakit untuk membuat surat persetujuan atau ketersediaan fasilitas demi memberikan perlindungan hukum rumah sakit terhadap resiko gugatan pasien akibat kurangnya ketersediaan fasilitas di rumah sakit.